

**Media Digital sebagai Ruang Partisipasi Politik: Analisis Gerakan
#IndonesiaGelap 2025 dan Diskursus Program Makan Bergizi Gratis
(MBG) pada Era Pemerintahan Prabowo–Gibran**

Irham Kaharuddin

Universitas Paramadina, Indonesia

iamirham@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the role of digital media in political communication in Indonesia through the case of the #IndonesiaGelap 2025 movement and public debates surrounding Makan Bergizi Gratis Program (MBG) during the Prabowo–Gibran administration. The research employed a descriptive qualitative approach using digital observation and document analysis of social media platforms, online news reports, and relevant supporting documents. Data were analyzed through data reduction, data display, and conclusion drawing, supported by source triangulation to enhance validity. The findings reveal that digital media functions as a digital public sphere that expands political participation, facilitates public opinion mobilization, and serves as a space for policy deliberation. The #IndonesiaGelap movement reflects the characteristics of connective action in digital political mobilization, while discussions on MBG demonstrate active public engagement in monitoring government policies. However, digital spaces are also characterized by political polarization, the spread of disinformation, and declining communication ethics. The study concludes that digital media plays a strategic role in democracy but requires stronger digital literacy and communication ethics to support a healthy democratic environment in Indonesia.

Keywords : *digital media, political communication, #IndonesiaGelap, Makan Bergizi Gratis Program, digital political participation.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran media digital dalam komunikasi politik di Indonesia melalui studi kasus gerakan #IndonesiaGelap 2025 dan perdebatan publik mengenai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada masa pemerintahan Prabowo–Gibran. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode observasi digital dan studi dokumentasi terhadap berbagai platform media sosial, pemberitaan media daring, serta dokumen pendukung lainnya. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan teknik triangulasi sumber untuk meningkatkan validitas temuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media digital berfungsi sebagai ruang publik digital yang memperluas partisipasi politik masyarakat, memfasilitasi mobilisasi opini publik, serta menjadi arena deliberasi kebijakan publik. Gerakan #IndonesiaGelap menunjukkan karakteristik *connective action* dalam mobilisasi politik digital, sedangkan diskursus MBG memperlihatkan keterlibatan publik dalam pengawasan kebijakan pemerintah. Namun demikian, ruang digital juga diwarnai polarisasi politik, penyebaran disinformasi, dan penurunan etika komunikasi. Penelitian menyimpulkan bahwa media digital memiliki peran strategis dalam demokrasi, tetapi memerlukan penguatan literasi digital dan etika komunikasi untuk menjaga kualitas demokrasi digital di Indonesia.

Kata kunci : *media digital, komunikasi politik, #IndonesiaGelap, Makan Bergizi Gratis, partisipasi politik digital.*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam praktik komunikasi politik. Kemajuan internet dan media sosial telah mengubah cara individu memperoleh informasi, berinteraksi, serta berpartisipasi dalam proses politik. Jika pada era media konvensional komunikasi politik cenderung berlangsung secara satu arah melalui televisi, radio, dan surat kabar, maka era digital menghadirkan pola komunikasi yang lebih interaktif, partisipatif, dan terdesentralisasi. Kehadiran media digital memungkinkan setiap individu tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga produsen dan distributor informasi politik. Kondisi ini menjadikan media digital sebagai salah satu elemen penting dalam perkembangan demokrasi modern (Castells, 2012).

Dalam konteks Indonesia, perkembangan media digital tidak hanya mengubah pola penyebaran informasi politik, tetapi juga mengubah relasi antara aktor politik dan masyarakat. Media sosial memungkinkan terjadinya komunikasi politik yang lebih partisipatif dan interaktif sehingga masyarakat memiliki peluang yang lebih besar untuk terlibat dalam proses demokrasi. Namun, keterbukaan ruang digital juga menghadirkan tantangan berupa meningkatnya disinformasi, polarisasi, serta menurunnya kualitas komunikasi publik (Widjanarko, 2022).

Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat pertumbuhan pengguna internet yang sangat pesat. Berdasarkan Survei Profil Internet Indonesia 2025 yang dirilis oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), jumlah pengguna internet di Indonesia telah mencapai 229,4 juta jiwa dari total populasi 284,4 juta jiwa atau setara dengan tingkat penetrasi internet sebesar 80,66 persen. Angka tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 79,5 persen. Tingginya penetrasi internet tersebut mengindikasikan bahwa ruang digital telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat Indonesia. Berbagai platform media sosial seperti *Instagram*, *TikTok*, *Facebook*, *WhatsApp*, *YouTube*, dan *X* (sebelumnya *Twitter*) tidak hanya digunakan untuk kebutuhan hiburan dan interaksi sosial, tetapi juga menjadi sarana utama dalam memperoleh informasi politik, mengikuti perkembangan isu-isu publik, serta berpartisipasi dalam berbagai aktivitas sosial dan politik secara digital (APJII, 2025).

Transformasi digital tersebut telah menciptakan ruang publik baru yang memungkinkan masyarakat untuk terlibat secara lebih aktif dalam kehidupan demokrasi. Dalam perspektif teori ruang publik, Habermas (1989) menjelaskan bahwa ruang publik merupakan arena diskursif tempat warga negara dapat bertukar gagasan, menyampaikan kritik, serta membentuk opini publik secara rasional. Kehadiran media digital memperluas konsep ruang publik tersebut karena memungkinkan komunikasi berlangsung tanpa batas geografis dan temporal. Melalui media sosial, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi, mengkritisi kebijakan pemerintah, serta mengawasi kinerja pejabat publik secara langsung.

Fenomena ini menunjukkan bahwa media digital berpotensi memperkuat demokrasi melalui peningkatan partisipasi politik warga negara (Habermas, 1989).

Dalam konteks komunikasi politik, media digital telah menjadi instrumen strategis bagi berbagai aktor politik untuk membangun citra, menyampaikan pesan politik, dan memobilisasi dukungan publik. Partai politik, calon legislatif, maupun calon presiden memanfaatkan media sosial untuk menjangkau pemilih secara lebih efektif dan efisien. Komunikasi politik yang sebelumnya bergantung pada kampanye tatap muka dan media massa kini semakin beralih ke platform digital yang mampu menjangkau audiens dalam jumlah besar dengan biaya yang relatif rendah. Menurut Castells (2012), perkembangan teknologi jaringan telah melahirkan konsep *network society* atau masyarakat jaringan, yakni suatu tatanan sosial di mana arus informasi dan komunikasi menjadi faktor utama dalam pembentukan kekuasaan dan pengaruh politik (Castells, 2012). Dalam masyarakat jaringan tersebut, media digital memainkan peran sentral dalam membentuk persepsi, sikap, dan perilaku politik masyarakat.

Selain memperluas akses terhadap informasi politik, media digital juga membuka peluang bagi munculnya berbagai bentuk partisipasi politik baru. Bentuk partisipasi tersebut tidak lagi terbatas pada aktivitas konvensional seperti mengikuti pemilu atau menghadiri kampanye, tetapi juga mencakup aktivitas digital seperti menyebarkan informasi politik, memberikan komentar terhadap isu publik, mengikuti petisi daring, hingga mengorganisasi gerakan sosial melalui media sosial. Dalam konteks Indonesia pasca-Pemilu 2024, fenomena tagar #IndonesiaGelap pada tahun 2025 menunjukkan bagaimana media sosial digunakan sebagai sarana mobilisasi opini publik dan ekspresi kritik terhadap berbagai kebijakan pemerintah. Melalui platform seperti *X*, *Instagram*, *TikTok*, *Facebook*, *Threads*, *YouTube*, dan *WhatsApp* masyarakat, aktivis, mahasiswa, serta kelompok masyarakat sipil menyampaikan berbagai aspirasi terkait kondisi ekonomi, lapangan pekerjaan, tata kelola pemerintahan, dan arah kebijakan nasional. Tagar tersebut berkembang menjadi ruang diskusi publik yang memperlihatkan tingginya partisipasi politik digital masyarakat dalam menyampaikan kritik dan tuntutan terhadap pemerintah.

Di sisi lain, program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program prioritas pemerintahan Prabowo–Gibran juga memunculkan dinamika komunikasi politik yang intens di ruang digital. Berbagai perdebatan mengenai efektivitas program, alokasi anggaran, manfaat sosial, hingga implementasinya di daerah menjadi topik yang banyak diperbincangkan oleh masyarakat di media sosial. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa media digital tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyebaran informasi politik, tetapi juga menjadi ruang publik digital tempat masyarakat membentuk opini, memberikan dukungan maupun kritik terhadap kebijakan pemerintah. Kondisi ini memperlihatkan bahwa media digital berperan penting dalam memperkuat partisipasi politik warga negara sekaligus menjadi arena pertarungan narasi yang memengaruhi kualitas demokrasi di Indonesia.

Meskipun demikian, optimisme terhadap peran media digital dalam memperkuat demokrasi tidak dapat dilepaskan dari berbagai persoalan yang menyertainya. Kemudahan dalam memproduksi dan mendistribusikan informasi juga menciptakan tantangan serius berupa penyebaran hoaks, disinformasi, malinformasi, ujaran kebencian, serta meningkatnya polarisasi politik di masyarakat. Kemampuan media digital dalam menyebarkan informasi secara cepat sering kali tidak diimbangi dengan kemampuan pengguna untuk melakukan verifikasi terhadap informasi yang diterima. Akibatnya, ruang digital menjadi lahan yang subur bagi penyebaran informasi yang menyesatkan dan manipulatif (Wardle, C., & Derakhshan, 2017).

Fenomena tersebut semakin terlihat dalam dinamika politik Indonesia pasca-Pemilihan Umum 2024. Media sosial tidak hanya menjadi sarana komunikasi politik selama masa kampanye, tetapi juga berkembang menjadi arena utama diskursus publik terkait berbagai kebijakan pemerintah. Perdebatan mengenai program MBG, efisiensi anggaran negara, serta munculnya gerakan digital seperti #IndonesiaGelap tahun 2025 menunjukkan bagaimana ruang digital menjadi tempat pertarungan narasi antara pemerintah, kelompok pendukung, oposisi, media, dan masyarakat sipil. Dalam proses tersebut, muncul praktik-praktik komunikasi politik yang problematis seperti penggunaan buzzer politik, penyebaran propaganda digital, kampanye negatif, serta produksi informasi yang bersifat manipulatif untuk memengaruhi persepsi publik.

Di samping persoalan politik, perkembangan media digital juga memunculkan tantangan yang berkaitan dengan etika komunikasi. Karakteristik media sosial yang memungkinkan anonimitas, kecepatan komunikasi, dan minimnya kontrol sosial menyebabkan terjadinya perubahan dalam norma-norma komunikasi masyarakat. Berbagai fenomena seperti *cyberbullying*, ujaran kebencian, *doxxing*, serta penghakiman massa secara daring atau *cancel culture* menunjukkan adanya pergeseran etika komunikasi dalam ruang digital (Lestari, D., & Wibowo, 2023). Banyak pengguna media sosial lebih mengutamakan viralitas dan popularitas dibandingkan akurasi informasi maupun dampak sosial dari pesan yang disampaikan. Akibatnya, kualitas interaksi publik mengalami penurunan yang ditandai dengan meningkatnya konflik verbal dan menurunnya toleransi terhadap perbedaan pandangan.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya hubungan yang erat antara komunikasi politik digital dan etika komunikasi. Degradasi etika komunikasi tidak hanya berdampak pada hubungan sosial antarindividu, tetapi juga memengaruhi kualitas demokrasi secara keseluruhan. Ujaran kebencian, disinformasi, dan serangan personal sering kali digunakan sebagai instrumen politik untuk mendelegitimasi kelompok lawan dan membentuk opini publik yang bias (Wardle, C., & Derakhshan, 2017). Akibatnya, ruang publik digital yang seharusnya menjadi arena deliberasi demokratis justru berubah menjadi ruang konflik yang sarat dengan polarisasi dan manipulasi informasi.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana media digital menjadi ruang diskusi publik di Indonesia dengan meninjau dinamika partisipasi politik, polarisasi masyarakat, serta perubahan etika komunikasi yang terjadi dalam ruang digital. Penelitian ini juga berupaya menjelaskan hubungan antara etika komunikasi digital dan kualitas demokrasi di Indonesia. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan studi komunikasi politik di era digital sekaligus menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah, institusi pendidikan, dan masyarakat dalam membangun ekosistem komunikasi digital yang lebih sehat, etis, dan demokratis.

TINJAUAN LITERATUR

1. Teori Ruang Publik (*Public Sphere Theory*)

Teori Ruang Publik yang dikemukakan oleh Habermas (1989) menjadi landasan utama dalam penelitian ini. Habermas menjelaskan bahwa ruang publik merupakan arena sosial tempat warga negara berkumpul untuk mendiskusikan berbagai persoalan publik secara rasional dan kritis. Dalam ruang publik tersebut, masyarakat memiliki kesempatan yang setara untuk menyampaikan pendapat, mengkritik kebijakan pemerintah, dan membentuk opini publik yang dapat memengaruhi proses pengambilan keputusan politik (Habermas, 1989).

Perkembangan media digital telah memperluas konsep ruang publik ke dalam bentuk ruang publik digital (*digital public sphere*). Media sosial seperti *Instagram*, *X*, *TikTok*, *Facebook*, dan *WhatsApp* memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam diskursus politik tanpa dibatasi ruang dan waktu. Melalui media digital, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi, memberikan kritik terhadap pemerintah, serta mengorganisasi berbagai gerakan sosial dan politik. Dalam konteks penelitian ini, teori ruang publik digunakan untuk menjelaskan bagaimana media digital menjadi arena baru komunikasi politik yang memungkinkan peningkatan partisipasi politik masyarakat sekaligus menjadi ruang terjadinya pertarungan narasi politik yang berpotensi memunculkan polarisasi sosial.

2. Teori Masyarakat Jaringan (*Network Society Theory*)

Teori Masyarakat Jaringan yang dikembangkan oleh Castells (2012) menjelaskan bahwa perkembangan teknologi informasi telah menciptakan struktur sosial baru yang berbasis jaringan komunikasi digital. Dalam masyarakat jaringan, arus informasi menjadi sumber utama kekuasaan dan pengaruh sosial. Individu, organisasi, maupun aktor politik dapat saling terhubung melalui jaringan digital yang melampaui batas geografis.

Menurut Castells (2012), kekuasaan dalam era digital tidak lagi sepenuhnya dikendalikan oleh institusi formal, melainkan juga oleh kemampuan aktor dalam mengendalikan arus informasi di dalam jaringan. Media sosial memungkinkan terjadinya komunikasi politik secara horizontal, di mana masyarakat dapat berinteraksi langsung dengan aktor politik tanpa melalui perantara media massa

konvensional (Castells, 2012). Teori ini relevan untuk menjelaskan fenomena mobilisasi politik digital yang berkembang pada masa pemerintahan Prabowo–Gibran, seperti munculnya gerakan #IndonesiaGelap pada tahun 2025 yang memanfaatkan media sosial sebagai sarana koordinasi, penyebaran informasi, serta ekspresi kritik publik terhadap berbagai kebijakan pemerintah. Melalui jaringan digital yang terhubung secara luas, masyarakat dapat membangun solidaritas, menyebarkan narasi alternatif, dan menggalang dukungan secara cepat tanpa harus melalui organisasi formal. Selain itu, teori masyarakat jaringan juga menjelaskan bagaimana perdebatan publik mengenai Program MBG berkembang melalui arus informasi yang tersebar di berbagai platform digital dan membentuk opini publik secara luas.

3. Teori Partisipasi Politik Digital

Partisipasi politik merupakan keterlibatan warga negara dalam proses politik yang bertujuan memengaruhi kebijakan pemerintah maupun proses pengambilan keputusan publik. Dalam era digital, bentuk partisipasi politik mengalami transformasi melalui pemanfaatan media sosial dan platform digital. Bennett dan Segerberg (2013) melalui konsep *connective action* menjelaskan bahwa media digital memungkinkan individu berpartisipasi dalam gerakan politik secara lebih fleksibel tanpa harus bergabung dalam organisasi formal. Media sosial mempermudah proses mobilisasi massa melalui penggunaan tagar, kampanye daring, petisi digital, dan berbagai bentuk aktivisme digital lainnya (Bennett, W. L., & Segerberg, 2013). Dalam penelitian ini, teori partisipasi politik digital digunakan untuk menjelaskan bagaimana media digital mendorong peningkatan keterlibatan masyarakat dalam aktivitas politik, termasuk penyebaran informasi politik, diskusi publik, kampanye digital, dan mobilisasi sosial.

Dalam konteks penelitian ini, teori partisipasi politik digital digunakan untuk menjelaskan bagaimana media digital mendorong peningkatan keterlibatan masyarakat dalam aktivitas politik, termasuk penyebaran informasi politik, diskusi publik, kampanye digital, dan mobilisasi sosial. Fenomena #IndonesiaGelap 2025 menunjukkan bentuk *connective action* di mana individu dapat terlibat dalam gerakan kritik sosial-politik melalui penggunaan tagar, unggahan konten, komentar, dan diskusi daring tanpa harus menjadi bagian dari organisasi politik tertentu. Sementara itu, perdebatan mengenai Program MBG memperlihatkan bagaimana media sosial menjadi ruang partisipasi publik dalam memberikan dukungan, kritik, maupun evaluasi terhadap kebijakan pemerintah.

4. Teori Polarisasi Politik dan *Echo Chamber*

Salah satu dampak negatif perkembangan media digital adalah meningkatnya polarisasi politik. Sunstein (2017) menjelaskan bahwa algoritma media sosial cenderung menciptakan fenomena *echo chamber* atau ruang gema, yakni kondisi ketika individu hanya terpapar pada informasi dan pandangan yang sesuai dengan keyakinannya sendiri. Fenomena tersebut diperkuat oleh keberadaan

filter bubble yang menyebabkan pengguna media sosial semakin jarang memperoleh informasi dari perspektif yang berbeda (Sunstein, 2017). Akibatnya, masyarakat menjadi lebih sulit menerima pandangan alternatif dan cenderung memperkuat identitas kelompoknya.

Dalam konteks politik Indonesia pasca-Pemilu 2024, fenomena ini terlihat dalam perdebatan digital mengenai berbagai kebijakan pemerintah, termasuk Program MBG dan munculnya gerakan #IndonesiaGelap 2025. Di media sosial terbentuk kelompok-kelompok pengguna yang cenderung hanya mengonsumsi dan menyebarkan informasi yang mendukung posisi politiknya masing-masing. Sebagian kelompok memandang MBG sebagai program strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sementara kelompok lain mengkritisi aspek anggaran, efektivitas, dan prioritas kebijakan. Situasi tersebut menunjukkan bagaimana algoritma media sosial dapat memperkuat polarisasi opini publik melalui mekanisme *echo chamber* dan *filter bubble*.

5. Teori Disinformasi dan *Information Disorder*

Wardle dan Derakhshan (2017) mengembangkan konsep *information disorder* untuk menjelaskan gangguan informasi yang terjadi dalam ekosistem digital. Mereka membagi gangguan informasi ke dalam tiga bentuk utama, yakni:

- Misinformation*, yakni informasi salah yang disebarkan tanpa niat untuk merugikan.
- Disinformation*, yakni informasi palsu yang sengaja dibuat untuk menyesatkan masyarakat.
- Malinformation*, yakni informasi benar yang digunakan untuk merugikan individu atau kelompok tertentu. (Wardle, C., & Derakhshan, 2017)

Dalam studi kasus penelitian ini, konsep *information disorder* digunakan untuk menjelaskan berbagai informasi yang beredar di media sosial terkait gerakan #IndonesiaGelap 2025 maupun Program MBG. Berbagai klaim yang belum terverifikasi, potongan informasi yang keluar dari konteks, hingga narasi yang bersifat manipulatif sering kali digunakan untuk memengaruhi persepsi publik terhadap pemerintah maupun kelompok kritis. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa media digital tidak hanya menjadi sarana penyebaran informasi, tetapi juga arena pertarungan narasi politik yang rentan terhadap disinformasi.

6. Teori Etika Komunikasi Digital

Etika komunikasi merupakan seperangkat nilai dan norma yang mengatur perilaku individu dalam berkomunikasi. Dalam konteks media digital, tantangan etika semakin kompleks karena komunikasi berlangsung secara cepat, anonim, dan menjangkau audiens yang luas. Konsep deindividuasi yang dikembangkan oleh Zimbardo (1969) menjelaskan bahwa individu yang berada dalam situasi anonim cenderung kehilangan kesadaran diri dan tanggung jawab sosial (Zimbardo, 1969). Dalam media sosial, kondisi tersebut sering memunculkan perilaku agresif seperti *cyberbullying*, ujaran kebencian, dan serangan personal.

Dalam konteks Indonesia, Widjanarko (2022) menjelaskan bahwa etika komunikasi digital menjadi fondasi penting dalam menjaga kualitas ruang publik digital. Rendahnya literasi digital dan lemahnya kesadaran etis pengguna media sosial berpotensi memicu penyebaran hoaks, ujaran kebencian, serta konflik sosial yang dapat mengganggu proses demokrasi (Widjanarko, 2022). Oleh karena itu, penguatan literasi digital perlu diiringi dengan penguatan etika komunikasi agar ruang digital dapat berfungsi sebagai sarana dialog publik yang sehat.

Selain itu, fenomena *cancel culture* dan *doxxing* menunjukkan semakin kaburnya batas antara ruang privat dan ruang publik. Kondisi ini berdampak pada menurunnya kualitas komunikasi publik dan meningkatnya konflik sosial di ruang digital. Dalam penelitian ini, teori etika komunikasi digital digunakan untuk menjelaskan bagaimana karakteristik media digital memengaruhi perilaku komunikasi masyarakat serta bagaimana degradasi etika komunikasi berkontribusi terhadap polarisasi politik dan menurunnya kualitas demokrasi.

Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa media digital merupakan ruang publik digital yang memfasilitasi komunikasi politik dan partisipasi masyarakat (Habermas, 1989). Dalam masyarakat jaringan (Castells, 2012), media digital memungkinkan mobilisasi politik dan pembentukan opini publik secara cepat dan luas. Namun, karakteristik media digital yang berbasis algoritma juga memunculkan fenomena *echo chamber*, polarisasi politik, serta penyebaran disinformasi (Sunstein, 2017) (Wardle, C., & Derakhshan, 2017). Pada saat yang sama, anonimitas dan minimnya kontrol sosial dalam ruang digital menyebabkan terjadinya degradasi etika komunikasi yang ditandai dengan meningkatnya ujaran kebencian, *cyberbullying*, dan *cancel culture*. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dinamika politik digital dan etika komunikasi memiliki hubungan yang saling memengaruhi. Semakin rendah kualitas etika komunikasi di ruang digital, semakin besar potensi terjadinya polarisasi politik dan menurunnya kualitas demokrasi.

Dengan demikian, penelitian ini memandang media digital sebagai variabel utama yang memengaruhi partisipasi politik, polarisasi politik, penyebaran disinformasi, serta perubahan etika komunikasi yang pada akhirnya berdampak pada kualitas demokrasi di Indonesia. Dalam dinamika diskursus digital mengenai #IndonesiaGelap dan Program MBG, berbagai bentuk pelanggaran etika komunikasi seperti ujaran kebencian, serangan personal, pelabelan politik, *doxxing*, serta *cyberbullying* banyak ditemukan dalam interaksi antarpengguna media sosial. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa kualitas demokrasi digital tidak hanya ditentukan oleh tingginya partisipasi politik, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat dalam menerapkan prinsip-prinsip etika komunikasi dalam menyampaikan pendapat dan merespons perbedaan pandangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memahami dan mendeskripsikan secara mendalam fenomena komunikasi politik dalam lanskap media digital Indonesia terkait dinamika partisipasi politik

masyarakat pada gerakan #IndonesiaGelap serta diskursus publik mengenai Program MBG pada masa pemerintahan Prabowo–Gibran. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana media digital menjadi ruang publik dalam pembentukan opini, partisipasi politik, mobilisasi sosial, serta pertarungan narasi antara masyarakat dan pemerintah. Menurut Soefijanto (2020), penelitian kualitatif deskriptif berupaya menggambarkan realitas sosial secara sistematis melalui interpretasi terhadap berbagai data yang relevan dengan fokus penelitian (Soefijanto, 2020).

Objek penelitian ini adalah aktivitas komunikasi politik yang berlangsung pada berbagai platform media digital, khususnya *X*, *Instagram*, *TikTok*, *Facebook*, *Threads*, dan *YouTube*, yang berkaitan dengan penyebaran tagar #IndonesiaGelap 2025 sebagai bentuk kritik publik terhadap berbagai kebijakan pemerintah serta diskursus mengenai Program MBG sebagai salah satu program unggulan pemerintahan Prabowo–Gibran. Penelitian berfokus pada bagaimana media digital digunakan sebagai sarana partisipasi politik, penyampaian aspirasi publik, pembentukan opini, mobilisasi dukungan maupun penolakan terhadap kebijakan pemerintah, serta munculnya polarisasi dan perdebatan politik di ruang digital. Fokus tersebut sejalan dengan konsep ruang publik digital yang menjelaskan bahwa media sosial telah menjadi arena utama diskursus politik dan pembentukan opini publik di era digital (Habermas, 1989) (Castells, 2012).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi digital terhadap unggahan, komentar, diskusi, tagar, serta berbagai bentuk interaksi pengguna media sosial yang berkaitan dengan #IndonesiaGelap 2025 dan Program MBG selama periode 2025–2026. Metode observasi digital digunakan untuk memahami pola komunikasi, bentuk partisipasi politik digital, serta dinamika interaksi yang berkembang dalam ruang publik daring (Kozinets, 2020). Selain itu, penelitian juga memanfaatkan studi dokumentasi melalui berbagai sumber sekunder seperti pemberitaan media daring, laporan lembaga riset, publikasi organisasi masyarakat sipil, dokumen pemerintah, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan komunikasi politik digital dan partisipasi politik masyarakat (Bowen, 2009). Data-data tersebut digunakan untuk memahami konteks sosial dan politik yang melatarbelakangi munculnya kedua fenomena tersebut.

Untuk meningkatkan validitas data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai platform media sosial, pemberitaan media massa, dokumen kebijakan pemerintah, laporan organisasi independen, serta hasil penelitian terdahulu. Triangulasi sumber dilakukan untuk memastikan konsistensi, akurasi, dan kredibilitas data penelitian sehingga temuan yang dihasilkan memiliki tingkat keabsahan yang lebih tinggi (Creswell, J., and Poth, 2018). Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan utama, yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Tahapan ini mengacu pada model analisis data interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña (Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, 2019). Pada tahap reduksi data, peneliti melakukan proses kategorisasi,

coding, seleksi, dan pengelompokan data berdasarkan tema-tema seperti partisipasi politik digital, ruang publik digital, dukungan terhadap Program Makan Bergizi Gratis, kritik melalui tagar #IndonesiaGelap, polarisasi politik, disinformasi, serta etika komunikasi digital. Selanjutnya, data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk uraian naratif yang didukung oleh berbagai temuan dari media sosial dan sumber dokumentasi lainnya. Tahap terakhir dilakukan melalui identifikasi pola, hubungan, dan keterkaitan antar-temuan untuk menjelaskan bagaimana media digital berperan dalam membentuk partisipasi politik masyarakat, memfasilitasi penyebaran aspirasi publik, serta memengaruhi dinamika komunikasi politik pada masa pemerintahan Prabowo–Gibran (Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, 2019) (Soefijanto, Totok Amin, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Media Digital sebagai Ruang Partisipasi Politik dalam Gerakan #IndonesiaGelap 2025

Beberapa media melaporkan bahwa tagar #IndonesiaGelap menjadi salah satu topik teratas di platform X pada Februari 2025. Kompas.com mencatat bahwa pada 20 Februari 2025 tagar tersebut mencapai sekitar 366 ribu unggahan dan terus mendominasi percakapan publik di media sosial (Muhammad Iqbal Amar, 2025). Tagar ini digunakan untuk mengekspresikan kekhawatiran masyarakat terhadap kondisi ekonomi, pendidikan, lapangan kerja, demokrasi, dan kebijakan pemerintah. Akun Instagram BEM Seluruh Indonesia (@bem_si) dan berbagai akun BEM kampus menjadi pusat penyebaran poster aksi, tuntutan demonstrasi, jadwal aksi nasional, serta narasi "Indonesia Gelap". Herald.id melaporkan bahwa gerakan ini pertama kali mendapatkan momentum setelah seruan aksi yang disebarluaskan melalui Instagram dan kemudian menyebar ke platform lain seperti X, TikTok, dan WhatsApp (Ibnu Kasir Amahoru, 2025).

Pengguna media sosial tidak hanya menyebarkan informasi tetapi juga memproduksi meme, infografis, video pendek, utas (*threads*), dan testimoni mengenai dampak kebijakan pemerintah. Praktik ini menunjukkan karakteristik *connective action*, yakni mobilisasi yang digerakkan oleh individu melalui jejaring digital tanpa ketergantungan pada struktur organisasi formal. Hal ini sesuai dengan konsep Bennett dan Segerberg (2013). Temuan penelitian Christiany Juditha menunjukkan adanya lonjakan engagement, mention, dan reach yang sangat tinggi selama periode puncak aksi Februari 2025 (Christiany Juditha, 2025). Berbagai media massa melaporkan bahwa aksi "Indonesia Gelap" berlangsung serentak di sejumlah kota dan dipusatkan di kawasan Patung Kuda, Jakarta. Aksi tersebut dimobilisasi melalui media sosial dan mendapat dukungan dari mahasiswa, aktivis, serta organisasi masyarakat sipil (Mokodompis, 2025).

Pemberitaan media mencatat beberapa tuntutan utama yang beredar luas melalui tagar #IndonesiaGelap, antara lain menolak pemotongan anggaran yang dianggap merugikan rakyat, menuntut transparansi program Makan Bergizi Gratis, menolak intervensi pemerintah dalam Pilkada, menolak dwifungsi TNI–Polri,

mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset, mendesak pengesahan RUU Masyarakat Adat, mendorong perlindungan terhadap kebebasan sipil dan demokrasi (Endra Mardhani, 2025).

Selanjutnya tingginya intensitas percakapan digital menyebabkan sejumlah pejabat negara memberikan tanggapan langsung terhadap narasi "Indonesia Gelap". Misalnya, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, secara terbuka merespons tagar tersebut dan menolak anggapan bahwa Indonesia sedang berada dalam kondisi "gelap". Respons pemerintah terhadap sebuah tagar menunjukkan bahwa percakapan digital telah menjadi bagian dari agenda politik nasional (Jateng, 2025).

Gerakan #IndonesiaGelap melibatkan berbagai elemen masyarakat sipil, antara lain Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI), Organisasi mahasiswa daerah, Kelompok advokasi demokrasi, Komunitas masyarakat adat, Aktivis antikorupsi, dan Akademisi dan dosen (Mokodompis, 2025). Partisipasi berbagai aktor non-negara menunjukkan bahwa media digital menjadi sarana konsolidasi lintas kelompok sosial yang sebelumnya terpisah secara geografis. Melalui media sosial, kelompok-kelompok tersebut dapat membangun jaringan advokasi dan solidaritas secara cepat dan murah.

Media digital telah berfungsi sebagai ruang publik kontemporer yang memungkinkan masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam proses komunikasi politik. Fenomena gerakan #IndonesiaGelap 2025 memperlihatkan bagaimana platform digital seperti *X*, *Instagram*, *TikTok*, *Facebook*, *Threads*, dan *YouTube* menjadi arena diskusi publik yang digunakan masyarakat untuk mengekspresikan pandangan, menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah, serta membangun kesadaran kolektif mengenai berbagai isu nasional. Dalam konteks ini, media digital tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyebaran informasi, tetapi juga sebagai ruang interaksi yang memungkinkan terjadinya pertukaran gagasan dan pembentukan opini publik secara lebih luas.

Temuan tersebut dapat dianalisis menggunakan teori Ruang Publik (*Public Sphere*) yang dikemukakan oleh Jürgen Habermas. Perkembangan teknologi informasi telah mengubah bentuk ruang publik tersebut. Jika pada masa sebelumnya ruang publik bergantung pada media konvensional dan pertemuan fisik, maka saat ini ruang publik berkembang ke ranah digital (*digital public sphere*). Dalam gerakan #IndonesiaGelap, media sosial menjadi medium yang memungkinkan masyarakat untuk mendiskusikan isu-isu publik secara terbuka tanpa harus bergantung pada institusi politik formal maupun media arus utama. Ribuan unggahan, komentar, video, infografis, dan diskusi daring yang menggunakan tagar #IndonesiaGelap menunjukkan adanya proses deliberasi publik mengenai berbagai kebijakan pemerintah, seperti efisiensi anggaran, kondisi ekonomi, lapangan pekerjaan, demokrasi, dan kebebasan sipil. Aktivitas tersebut mencerminkan fungsi utama ruang publik sebagaimana dijelaskan Habermas, yakni sebagai arena pembentukan opini publik melalui komunikasi antarsesama warga negara.

Selain menjadi ruang diskusi, media digital dalam gerakan #IndonesiaGelap juga berfungsi sebagai sarana kontrol sosial terhadap pemerintah. Habermas menjelaskan bahwa ruang publik memiliki peran penting dalam mengawasi kekuasaan negara melalui pembentukan opini publik yang kritis. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa masyarakat memanfaatkan media sosial untuk mengkritik kebijakan pemerintah, menyampaikan aspirasi, dan menuntut akuntabilitas penyelenggara negara. Berbagai kritik yang disampaikan melalui tagar #IndonesiaGelap menunjukkan bahwa masyarakat tidak lagi menjadi penerima informasi yang pasif, melainkan aktor politik yang aktif dalam proses demokrasi. Dengan demikian, media digital telah memperluas kesempatan partisipasi politik warga negara dalam mengawasi jalannya pemerintahan.

Namun demikian, karakteristik ruang publik digital dalam gerakan #IndonesiaGelap menunjukkan beberapa perbedaan dengan konsep ruang publik ideal yang dikemukakan Habermas. Dalam ruang publik ideal, diskursus publik berlangsung secara rasional, setara, dan bebas dari dominasi kepentingan tertentu. Sebaliknya, ruang publik digital sering kali ditandai oleh polarisasi opini, penyebaran informasi yang belum terverifikasi, serta penggunaan narasi emosional yang dapat memperkuat konflik antar kelompok. Meskipun demikian, keterbukaan akses media digital tetap memungkinkan lebih banyak warga negara untuk berpartisipasi dalam diskursus politik dibandingkan ruang publik konvensional yang cenderung terbatas pada kelompok tertentu.

Untuk menjelaskan proses mobilisasi yang terjadi dalam gerakan #IndonesiaGelap, teori *Connective Action* dari W. Lance Bennett dan Alexandra Segerberg (2013) juga relevan digunakan. Bennett dan Segerberg berpendapat bahwa media digital memungkinkan terbentuknya aksi kolektif melalui jejaring komunikasi yang lebih fleksibel, tanpa memerlukan struktur organisasi yang kuat sebagaimana gerakan sosial tradisional. Dalam *connective action*, partisipasi individu dibangun melalui proses berbagi konten, penggunaan tagar, dan produksi pesan personal yang dapat dengan mudah terhubung dengan individu lain dalam jaringan digital.

Fenomena #IndonesiaGelap memperlihatkan karakteristik *connective action* tersebut. Mobilisasi tidak sepenuhnya digerakkan oleh organisasi formal, melainkan berkembang melalui partisipasi individu yang menyebarkan informasi, membuat konten kritik, membagikan pengalaman pribadi, serta mengajak pengguna lain untuk terlibat dalam diskusi maupun aksi demonstrasi. Tagar #IndonesiaGelap berfungsi sebagai simbol identitas bersama yang menghubungkan berbagai kelompok masyarakat dengan latar belakang yang berbeda. Melalui media sosial, individu-individu yang sebelumnya terpisah secara geografis dapat membangun solidaritas digital berdasarkan kesamaan kepentingan dan keresahan terhadap situasi politik yang sedang berlangsung.

Lebih lanjut, temuan penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara partisipasi politik daring (*online political participation*) dan partisipasi politik luring (*offline political participation*). Diskusi yang berkembang di

media sosial tidak berhenti pada ruang virtual, tetapi berlanjut menjadi aksi demonstrasi yang dilakukan di berbagai daerah. Hal ini menunjukkan bahwa media digital tidak hanya berfungsi sebagai ruang ekspresi politik, tetapi juga sebagai sarana mobilisasi sosial yang mampu menghubungkan komunikasi daring dengan tindakan politik nyata. Dengan kata lain, ruang publik digital dalam gerakan #IndonesiaGelap berhasil mentransformasikan opini publik menjadi aksi kolektif yang bertujuan memengaruhi kebijakan dan perhatian pemerintah.

2. Dinamika Perdebatan Publik Mengenai Program MBG

Sejak masa kampanye hingga awal pemerintahan Prabowo–Gibran, Program MBG menjadi salah satu topik yang paling sering dibahas di platform *X*, *Instagram*, *TikTok*, *Facebook*, *Threads*, dan *YouTube*. Percakapan digital menunjukkan adanya dua kelompok narasi yang dominan. Narasi pendukung menekankan bahwa MBG dapat meningkatkan status gizi anak sekolah; menurunkan prevalensi stunting; mendukung kualitas sumber daya manusia jangka panjang; dan merupakan investasi strategis menuju Indonesia Emas 2045. Sebaliknya, narasi kritis mempertanyakan besarnya kebutuhan anggaran; kesiapan distribusi makanan di daerah; risiko korupsi dan kebocoran anggaran; dan efektivitas program dibandingkan intervensi sosial lainnya. Di platform *X* misalnya, unggahan yang membahas "MBG", "Makan Bergizi Gratis", menghasilkan ribuan komentar yang memperlihatkan polarisasi opini publik terhadap program tersebut.

Menanggapi Program MBG, masyarakat di ranah digital secara aktif membuat video ulasan di *TikTok*; infografis mengenai anggaran MBG; podcast dan diskusi *YouTube*; utas (*threads*) di *X*; dan konten edukatif mengenai stunting dan gizi. Fenomena ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya menjadi konsumen informasi pemerintah, tetapi juga produsen informasi yang ikut membentuk wacana kebijakan publik. Berbagai media nasional menyoroti besarnya anggaran yang dibutuhkan untuk MBG. Menurut pernyataan pemerintah, kebutuhan anggaran MBG diperkirakan mencapai ratusan triliun rupiah per tahun apabila program diterapkan secara nasional. Isu ini menjadi salah satu topik yang paling sering diberitakan karena berkaitan dengan keberlanjutan fiskal negara. Media seperti *Kompas.com*, *Tempo.co*, *CNN Indonesia* dan *Katadata* secara rutin memuat laporan mengenai sumber pendanaan, simulasi anggaran, dan dampak fiskal MBG.

Pemberitaan juga memperlihatkan perbedaan pandangan para ekonom, ahli gizi, dan pengamat kebijakan publik. Kelompok pendukung menilai program serupa telah berhasil di berbagai negara; investasi gizi menghasilkan manfaat ekonomi jangka panjang; dan MBG dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan anak. Sementara kelompok kritis menilai masalah stunting tidak hanya berkaitan dengan makanan sekolah; diperlukan perbaikan sanitasi dan layanan kesehatan; dan program berpotensi mengurangi ruang fiskal untuk sektor lain.

Disisi lain dokumen visi-misi pemerintahan Prabowo–Gibran menempatkan MBG sebagai salah satu program unggulan nasional. Pemerintah menjelaskan bahwa tujuan utama MBG adalah meningkatkan kualitas gizi anak sekolah; menurunkan

angka stunting; meningkatkan kualitas sumber daya manusia; dan memperkuat ketahanan pangan nasional. Dalam berbagai dokumen resmi pemerintah, BGN bertugas mengelola pelaksanaan program; melakukan pengawasan distribusi; memastikan kualitas makanan; dan mengoordinasikan berbagai pemangku kepentingan. Keberadaan BGN kemudian menjadi bagian dari diskursus publik mengenai kesiapan implementasi program.

Sementara itu lembaga riset *Center of Economic and Law Studies* (CELIOS) beberapa kali mengeluarkan analisis mengenai dampak fiskal Program MBG. Dapat dikatakan CELIOS sebenarnya sudah memprediksi dampak program MBG. Beberapa temuan yang sering dikutip antara lain program membutuhkan pembiayaan sangat besar; perlu mitigasi terhadap potensi pembengkakan anggaran; dibutuhkan transparansi dan evaluasi berkala (CELIOS, 2024). Peneliti *Institute for Development of Economics and Finance* (INDEF) menilai bahwa keberhasilan MBG akan sangat ditentukan oleh efektivitas tata kelola; kapasitas distribusi; kualitas pengawasan; dan keberlanjutan sumber pembiayaan (Dr. M. Rizal Taufikurrahman & Tim, 2026). Temuan tersebut menjadi dasar munculnya perdebatan publik mengenai kesiapan negara menjalankan program dalam skala nasional.

Beberapa peneliti SMERU menekankan bahwa intervensi gizi yang efektif memerlukan pendekatan multidimensi, meliputi pangan; kesehatan ibu dan anak; sanitasi; dan pendidikan kesehatan (Arif et al., 2020). Pandangan ini kemudian menjadi salah satu dasar kritik bahwa MBG saja belum cukup untuk menyelesaikan persoalan stunting.

Pembahasan di atas menunjukkan bahwa Program MBG tidak hanya menjadi kebijakan publik yang diimplementasikan pemerintah, tetapi juga menjadi objek deliberasi publik yang intensif di ruang digital. Tingginya volume percakapan, munculnya dukungan dan kritik yang saling berhadapan, serta keterlibatan berbagai aktor seperti masyarakat, akademisi, lembaga riset, media massa, dan organisasi masyarakat sipil menunjukkan bahwa media digital telah berfungsi sebagai ruang deliberasi kebijakan. Dalam perspektif teori Ruang Publik Habermas, diskursus mengenai MBG mencerminkan proses pembentukan opini publik melalui pertukaran argumen yang berlangsung secara terbuka. Sementara itu, dari perspektif demokrasi digital, fenomena ini menunjukkan bahwa warga negara semakin aktif mengawasi, mengevaluasi, dan memengaruhi proses kebijakan publik melalui partisipasi politik yang dimediasi teknologi digital.

3. Polarisasi Opini dan Pertarungan Narasi di Ruang Digital

Hasil penelitian menunjukkan perdebatan mengenai #IndonesiaGelap dan Program MBG memunculkan kecenderungan polarisasi opini di media sosial. Pengguna media digital cenderung membentuk kelompok-kelompok diskursif yang mendukung atau menolak narasi tertentu. Kelompok pendukung pemerintah umumnya memandang tagar #IndonesiaGelap sebagai bentuk pesimisme dan politisasi isu publik, sedangkan kelompok kritis menganggap tagar tersebut sebagai sarana menyampaikan aspirasi dan kritik terhadap kebijakan pemerintah.

Fenomena serupa juga terlihat dalam diskursus mengenai MBG. Narasi yang berkembang sering kali tidak lagi berfokus pada substansi kebijakan, tetapi bergeser menjadi perdebatan identitas politik antara kelompok pendukung dan pengkritik pemerintah. Hasil observasi menunjukkan bahwa algoritma media sosial memperkuat kecenderungan tersebut melalui distribusi konten yang sesuai dengan preferensi pengguna. Akibatnya, ruang digital berpotensi membentuk echo chamber yang mempersempit ruang dialog antarkelompok dan memperkuat polarisasi politik sebagaimana dijelaskan oleh Sunstein (2017).

4. Penyebaran Informasi, Disinformasi, dan Etika Komunikasi Digital

Penelitian juga menemukan bahwa tingginya intensitas diskusi mengenai #IndonesiaGelap 2025 dan MBG di media sosial diikuti oleh munculnya berbagai bentuk informasi yang belum terverifikasi, interpretasi yang menyesatkan, serta penyebaran narasi yang bersifat provokatif. Beberapa unggahan memuat klaim yang tidak disertai data yang memadai sehingga memicu kesalahpahaman di kalangan pengguna media sosial. Kondisi ini menunjukkan bahwa ruang digital tidak hanya menjadi sarana partisipasi politik, tetapi juga rentan terhadap penyebaran *misinformation* dan *disinformation* sebagaimana dijelaskan oleh Wardle dan Derakhshan (2017).

Selain itu, hasil observasi menunjukkan adanya kecenderungan penurunan kualitas etika komunikasi dalam perdebatan publik mengenai kedua isu tersebut. Berbagai komentar yang mengandung ujaran kebencian, serangan personal, pelabelan negatif, dan delegitimasi terhadap kelompok yang berbeda pandangan masih banyak ditemukan. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa kebebasan berekspresi di ruang digital belum sepenuhnya diimbangi dengan kesadaran etika komunikasi. Akibatnya, ruang publik digital yang seharusnya menjadi arena dialog demokratis sering kali berubah menjadi ruang konflik dan konfrontasi yang menghambat terciptanya diskursus publik yang sehat.

5. Media Digital dan Kualitas Demokrasi

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa media digital memiliki peran ganda dalam demokrasi Indonesia. Di satu sisi, media digital memperluas partisipasi politik masyarakat melalui gerakan #IndonesiaGelap dan keterlibatan publik dalam diskursus Program MBG. Di sisi lain, media digital juga memunculkan tantangan berupa polarisasi politik, penyebaran disinformasi, serta degradasi etika komunikasi. Temuan ini menunjukkan bahwa kualitas demokrasi digital tidak hanya ditentukan oleh akses terhadap teknologi informasi, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat dalam membangun budaya komunikasi yang kritis, etis, dan bertanggung jawab.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa media digital memiliki peran yang sangat signifikan dalam dinamika komunikasi politik di Indonesia, khususnya dalam

fenomena gerakan #IndonesiaGelap 2025 dan perdebatan publik mengenai Program MBG pada awal masa pemerintahan Prabowo–Gibran. Media digital tidak lagi sekadar berfungsi sebagai saluran penyebaran informasi, tetapi telah berkembang menjadi ruang publik digital yang memungkinkan masyarakat berpartisipasi secara aktif dalam diskursus politik, menyampaikan aspirasi, mengkritisi kebijakan pemerintah, serta membangun solidaritas sosial melalui jejaring komunikasi digital. Pada fenomena #IndonesiaGelap 2025, media sosial seperti *X*, *Instagram*, *TikTok*, *Facebook*, *Threads*, *YouTube* dan *WhatsApp* menjadi sarana utama mobilisasi politik dan pembentukan opini publik. Penggunaan tagar #IndonesiaGelap berhasil menghubungkan berbagai kelompok masyarakat, termasuk mahasiswa, akademisi, aktivis, organisasi masyarakat sipil, dan warga negara biasa dalam sebuah ruang diskursif yang memperdebatkan berbagai isu nasional. Temuan ini memperlihatkan bahwa media digital berfungsi sebagai ruang publik digital sebagaimana dikemukakan oleh Habermas serta mendukung terbentuknya *connective action* yang memungkinkan mobilisasi kolektif melalui jaringan komunikasi yang fleksibel.

Dalam diskursus mengenai Program MBG, media digital juga berfungsi sebagai ruang deliberasi kebijakan publik. Berbagai aktor, mulai dari pemerintah, media massa, akademisi, lembaga riset, hingga masyarakat umum terlibat dalam pertukaran argumen mengenai manfaat, tantangan, dan implikasi program tersebut. Tingginya intensitas percakapan menunjukkan bahwa masyarakat semakin aktif dalam mengawasi dan mengevaluasi kebijakan publik melalui partisipasi politik digital. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa keterbukaan ruang digital diikuti oleh munculnya berbagai tantangan.

Perdebatan mengenai #IndonesiaGelap dan MBG menunjukkan adanya kecenderungan polarisasi opini yang membentuk kelompok-kelompok diskursif berdasarkan identitas politik tertentu. Algoritma media sosial turut memperkuat fenomena *echo chamber* sehingga pengguna lebih sering terpapar pada informasi yang sejalan dengan preferensinya. Selain itu, tingginya arus informasi di ruang digital juga memunculkan risiko penyebaran misinformasi, disinformasi, serta menurunnya kualitas etika komunikasi yang ditandai oleh munculnya ujaran kebencian, serangan personal, dan pelabelan negatif terhadap kelompok yang berbeda pandangan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa media digital memiliki karakter yang paradoks dalam demokrasi. Di satu sisi, media digital memperluas ruang partisipasi politik, meningkatkan keterlibatan warga negara, dan memperkuat fungsi pengawasan publik terhadap pemerintah. Di sisi lain, media digital juga berpotensi memperkuat polarisasi politik, mempercepat penyebaran informasi yang tidak terverifikasi, dan menurunkan kualitas diskursus publik apabila tidak diimbangi dengan literasi digital dan etika komunikasi yang memadai. Oleh karena itu, kualitas demokrasi digital tidak hanya ditentukan oleh akses terhadap teknologi informasi, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat dan

pemangku kepentingan dalam membangun budaya komunikasi yang kritis, inklusif, etis, dan bertanggung jawab.

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan. Pertama, pemerintah perlu meningkatkan transparansi komunikasi publik terkait berbagai kebijakan strategis, termasuk Program MBG, melalui penyediaan informasi yang akurat, mudah diakses, dan berbasis data. Transparansi yang baik dapat mengurangi kesalahpahaman publik sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses kebijakan. Kedua, platform media digital dan pemangku kepentingan terkait perlu memperkuat upaya pencegahan penyebaran misinformasi dan disinformasi melalui mekanisme verifikasi informasi, kolaborasi dengan lembaga pemeriksa fakta, serta pengembangan sistem moderasi konten yang lebih efektif tanpa mengurangi kebebasan berekspresi masyarakat.

Ketiga, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil, dan media massa perlu meningkatkan program literasi digital dan literasi politik masyarakat. Literasi digital yang memadai akan membantu masyarakat dalam memilah informasi, memahami konteks kebijakan publik, serta berpartisipasi secara lebih kritis dan bertanggung jawab dalam ruang digital. Keempat, masyarakat sebagai pengguna media digital perlu mengembangkan etika komunikasi yang lebih baik dengan mengedepankan dialog yang rasional, menghargai perbedaan pandangan, serta menghindari penyebaran informasi yang belum terverifikasi. Upaya ini penting untuk menjaga kualitas ruang publik digital sebagai arena diskusi demokratis yang sehat. Kelima, bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian dengan pendekatan kuantitatif atau *mixed methods* guna mengukur secara lebih mendalam pola interaksi, sentimen publik, jaringan percakapan, serta pengaruh algoritma media sosial terhadap pembentukan opini politik. Penelitian lanjutan juga dapat memperluas objek kajian pada platform digital tertentu atau membandingkan fenomena komunikasi politik digital pada berbagai kebijakan publik dan gerakan sosial di Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, S., Isdijoso, W., Fatah, A. R., & Tamyis, A. R. (2020). *Tinjauan Strategis Ketahanan Pangan Dan Gizi Di Indonesia*. https://smeru.or.id/sites/default/files/publication/rr_fsn_indonesia_finalreport_ind.pdf
- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. (2025). *Profil Internet Indonesia 2025*. <https://survei.apjii.or.id/>
- Bennett, W. L., & Segerberg, A. (2013). *The Logic Of Connective Action: Digital Media And The Personalization Of Contentious Politic*. Cambridge University Press.
- Bowen, G. A. (2009). Document Analysis As A Qualitative Research Method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40. <https://doi.org/https://rediie.cl/wp-content/uploads/document-analysis.pdf>
- Castells, M. (2012). *Networks Of Outrage And Hope: Social Movements In The Internet*

Age. Polity Press.

- CELIOS. (2024). *Free Nutritious Meals: Economic Impacts And The Consequences Of The National Budget Deficit*. <https://celios.co.id/free-nutritious-meals-economic-impacts-and-the-consequences-of-the-national-budget-deficit/>
- Christiany Juditha. (2025). The Phenomenon Of “Indonesia Gelap” On Social Media: Sentiment Analysis And Public Opinion Polarization. *Jurnal Komunikasi*, 17(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.24912/jk.v17i1.33846>
- Creswell, J., And Poth, C. (2018). *Qualitative Inquiry & Research Design: Choosingsamong Five Approaches*. SAGE Publications.
- Dr. M. Rizal Taufikurahman & Tim. (2026). *Dampak Realokasi Anggaran Melalui Program MBG Terhadap Kinerja Indikator Ekonomi: Sebuah Model Overlapping Generation Indonesia (OG-IDN)*. <https://indef.or.id/wp-content/uploads/2026/01/dampak-program-mbg-based-on-ogidn-model-rev1.pdf>
- Endra Mardhani. (2025). Tagar “Indonesia Gelap” Menggema, Berikut 7 Tuntutan Mahasiswa Di Depan Istana Merdeka. *Fajar.co.id*. <https://fajar.co.id/2025/02/17/tagar-indonesia-gelap-menggema-berikut-7-tuntutan-mahasiswa-di-depan-istana-merdeka>
- Habermas, J. (1989). *The Structural Transformation Of The Public Sphere: An Inquiry Into A Category Of Bourgeois Society (T. Burger, Trans.)*. MIT Press.
- Ibnu Kasir Amahoru. (2025). Tagar Indonesia Gelap Menggema, Ini Tuntutan Mahasiswa. *Herald.id*. <https://herald.id/2025/02/17/tagar-indonesia-gelap-menggema-ini-tuntutan-mahasiswa>
- Jateng, T. (2025). *Luhut Tanggapi Demo Mahasiswa Indonesia Gelap: Kau Yang Gelap*. Tribun Jateng. <https://www.youtube.com/watch?v=j78m0kfyuqc>
- Kozinets, R. V. (2020). *Netnography: The Essential Guide To Qualitative Social Media Research (3rd Ed.)*. SAGE Publications.
- Lestari, D., & Wibowo, A. (2023). Etika Komunikasi Digital Dan Perilaku Pengguna Media Sosial Di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Indonesia*, 12(2), 115–129. <https://doi.org/https://doi.org/10.7454/jkmi>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2019). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (4th Ed.)*. SAGE Publications.
- Mokodompis, S. (2025). Tagar “Indonesiagelap” Dan Tuntutan Dalam Aksi Demonstrasi. *Penagar.id*. <https://penagar.id/tagar-indonesiagelap-dan-tuntutan-dalam-aksi-demonstrasi>
- Muhammad Iqbal Amar. (2025). Tagar #Indonesiagelap Jadi Trending, Bentuk Sentimen Negatif Terhadap Pemerintah? *Kompas.com*. <https://amp.kompas.com/tren/read/2025/02/20/095352665/tagar-indonesiagelap-jadi-trending-bentuk-sentimen-negatif-terhadap>
- Soefijanto, Totok Amin, Dkk. (2020). *Metode Penelitian Ilmiah: Pendekatan Teori Dan Implikasi*. PT Rajawali Buana Pusaka.
- Sunstein, C. R. (2017). *#Republic: Divided Democracy In The Age Of Social Media*. Princeton University Press.

- Wardle, C., & Derakhshan, H. (2017). *Information Disorder: Toward An Interdisciplinary Framework For Research And Policymaking*. Council Of Europe.
- Widjanarko, P. (2022). *Komunikasi Digital Dan Demokrasi Di Indonesia*. Prenadamedia Group.
- Zimbardo, P. G. . (1969). The Human Choice: Individuation, Reason, And Order Versus Deindividuation, Impulse, And Chaos. In W. J. Arnold & D. Levine (Eds.). In *Nebraska Symposium On Motivation* (Vol. 17). University Of Nebraska Press.